

## **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE**

**Mikhael Fransisko Emiliano Karvallo**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[mikhaelfransisko.karvallo@gmail.com](mailto:mikhaelfransisko.karvallo@gmail.com)

**Achluddin Ibnu Rochim**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id)

**Hasan Ismail**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[hasanismail@untag-sby.ac.id](mailto:hasanismail@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Gangguan Jiwa merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Kabupaten Ende dan juga memiliki implikasi sosial yang serius. Banyaknya gelandangan dengan gangguan jiwa di sekitar Kabupaten Ende menunjukkan perlunya rehabilitasi oleh pemerintah. Rehabilitasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kembali kesehatan jiwanya. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui lembaga sosial milik pemerintah daerah maupun swasta, antara lain Dinas Sosial Kabupaten Ende. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dalam observasi lapangan. Penelitian ini berfokus pada mendalami bagaimana program ini dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya serta bentuk-bentuk layanan rehabilitasi yang disediakan. Rehabilitasi adalah proses membantu sesuatu untuk kembali ke kondisi semula, atau setidaknya memiliki pengganti yang setara Ketika diterapkan pada manusia, terutama dalam konteks rehabilitasi sosial, ini merujuk pada bantuan yang diberikan kepada individu dengan gangguan fisik atau mental untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat atau untuk memulihkan kesehatan jiwa mereka agar dapat berfungsi seperti sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa , kedua Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Dinas Sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder di Dinas Sosial di Kabupaten Ende penelitian ini menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari

penelitian ini adalah pengimplementasian program Rehabilitai Orang Dengan Gangguan Jiwa sudah berjalan dengan baik, hal tersebut didasari oleh faktor keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organiasai dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan, sosial, dan politik.

**Kata Kunci:** *Gangguan Jiwa, Rehabilitasi*

#### **ABSTRACT**

Mental disorders are a major public health problem in Ende Regency and also have serious social implications. The large number of homeless people with mental disorders around Ende Regency shows the need for rehabilitation by the government. Rehabilitation is an important step that must be taken by people with mental disorders to regain their mental health. Social rehabilitation can be carried out through social institutions owned by the local government or the private sector, including the Ende Regency Social Service. The government has a responsibility to provide rehabilitation services for people with mental disorders based on various problems found by the author in field observations. This study focuses on exploring how this program is run, the factors that influence the process and the forms of rehabilitation services provided. Rehabilitation is the process of helping something to return to its original condition, or at least have an equivalent replacement When applied to humans, especially in the context of social rehabilitation, it refers to assistance given to individuals with physical or mental disorders to reintegrate into society or to restore their mental health so that they can function as before. The problem in this study is the first, how to Implement a Rehabilitation Program for People with Mental Disorders, second What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Rehabilitation Program for People with Mental Disorders at the Social Service. The data sources used in this study are primary data and secondary data at the Social Service in Ende Regency. This study uses the Van Metter and Van Horn Theory and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study are that the implementation of the Rehabilitation Program for People with Mental Disorders has been running well, this is based on the success factors of implementation, namely the size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes and tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities, and the environment, social, and politics.

**Keywords :** *Mental Disorders, Rehabilitation*

#### **A. PENDAHULUAN**

Masalah sosial merujuk pada situasi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah sosial, termasuk masalah ekonomi, budaya, psikologis, dan biologis. Salah satu faktor penyebab masalah sosial adalah faktor psikologis, yang melibatkan pola pikir yang tidak sejalan dengan tatanan kehidupan sosial masyarakat atau individu tertentu. Salah satu faktor psikologis yang dapat menyebabkan masalah sosial adalah gangguan mental

atau penyakit kejiwaan. Gangguan mental mengacu pada pola psikologis atau perilaku yang umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian normal dari perkembangan manusia. Gangguan ini melibatkan kombinasi komponen afektif, perilaku, kognitif, atau persepsi yang terkait dengan fungsi tertentu dalam otak atau sistem saraf yang memengaruhi fungsi sosial manusia. Beberapa contoh gangguan mental termasuk depresi, gangguan jiwa, atau psikosis. Keberadaan individu dengan gangguan jiwa di dalam masyarakat dapat menjadi masalah sosial baru yang membutuhkan tindakan khusus untuk mengatasinya.

Gangguan jiwa meliputi berbagai kondisi yang tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan jiwa, di sisi lain, adalah keadaan di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu tersebut memiliki kesadaran akan kemampuan dirinya sendiri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa, termasuk dalam hal ini adalah hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain. Contohnya adalah situasi di mana seseorang merasa diperlakukan secara tidak adil, semena-mena, mengalami kegagalan dalam hubungan asmara, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Menurut pandangan Sigmund Freud yang dikutip dalam Maslim (2002), gangguan jiwa terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan dorongan naluri seksual dengan tuntutan moral dan norma sosial yang ada dalam super ego. Seseorang berharap untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memberikan kepuasan pribadi, namun tindakan tersebut akan dikecam oleh masyarakat. Ketidaksepakatan antara keinginan individu dan harapan masyarakat dapat akhirnya mengakibatkan masalah mental. ODMK adalah individu yang menghadapi tantangan dalam hal fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup. Mereka berisiko mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan perhatian khusus. Tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penderita gangguan jiwa berada pada pemerintah daerah. Hak-hak ini termasuk untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi agar mereka dapat pulih sepenuhnya dan berkontribusi secara sosial dan ekonomis. Gangguan jiwa tidak mengenal batasan usia dan dapat mempengaruhi siapa saja

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan

dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut.

1. Isi Kebijakan (Policy Content)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Aktor Atau Pemangku Kepentingan Kebijakan (Policy Stakeholder)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

3. Lingkungan Kebijakan (Policy Environment)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.

Menurut Nurdin Usman (2005:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah Harsono, (2006:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2009:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa (2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Menurut (Grindle, 1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan top-down yang diformulasikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Leo Agustino (Agustino, 2016) dengan judul *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ialah suatu abstraksi ataupun performansi dari sesuatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya secara terencana dicoba buat mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam ikatan dengan bermacam variabel. Model ini mengandaikan jika implementasi kebijakan berjalan baik dari keputusan politik yang ada, pelaksana, serta kinerja kebijakan publik

Terdapat 6 variabel, bagi Van Meter dan Van Horn, yang pengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

#### 1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung makna sebagai acuan. Sementara sasaran dalam KBBI mengandung arti sesuatu yang menjadi tujuan. Standar dan sasaran kebijakan disini bertujuan untuk menilai bagaimana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah terealisasikan. Dan dari indikator ini juga kita dapat melihat apakah implementasi berhasil atau tidak yaitu dari bagaimana SOP Pelayanan, Pengawasan dan Rehabilitasi Sosial Orang, dimana di dalamnya terdapat proses SOP rehabilitas juga.

#### 2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari keahlian menggunakan sumber daya yang ada. Manusia ialah sumber energi yang terutama dalam memastikan sesuatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi menuntut terdapatnya sumber daya manusia yang bermutu dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah diresmikan secara politik. Namun di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang butuh diperhitungkan pula yakni sumber daya finansial serta waktu.

#### 3. Komunikasi Antar-Organisasi serta Kegiatan Pelaksana

Berdasarkan teori implementasi model Van Meter dan Van Horn, komunikasi atau kejelasan informasi terkait apa standar dan tujuan dari kebijakan haruslah dikomunikasikan secara konsisten dan seragam kepada para pelaksana. Sebab jika tidak ada kejelasan, konsistensi dan keseragaman dalam informasi maka akan menjadikan terhambatnya suatu implementasi kebijakan. Karena dengan kejelasan dari informasi tadi maka para pelaku (implementor) mengetahui apa yang hendak dicapai dan tahu apa yang harus dilakukan demi keberhasilan implementasi kebijakan itu.

#### 4. Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van meter dan Van Horn sebagai para pelaksana kebijakan maka semua implementor tentunya dituntut agar lebih disiplin dan ketat pada proses

implementasinya serta pelaksanaan implementasi tersebut haruslah sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditentukan dari awal. Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan para implementor yang demokratis yang artinya para agen pelaksana melaksanakan kebijakan haruslah sesuai dengan standar dan sasaran yang sudah ditentukan serta persuasif artinya dibutuhkan implementor yang mampu mengajak orang lain untuk berpartisipasi.

5. Sikap ataupun Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustinus, 2006, : 6) yaitu sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangatlah mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik

Perihal terakhir yang butuh pula dicermati guna memperhitungkan kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu sejauhmana lingkungan eksternal ikut mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang sudah diresmikan. Lingkungan tersebut adalah lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Lingkungan yang tidak kondusif bisa jadi mempengaruhi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya buat mengimplementasikan kebijakan wajib pula mencermati keadaan lingkungan eksternal

### **Program Rehabilitasi**

Menurut WHO (2011), yang dimaksud dengan sehat jiwa adalah a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively , and is able to make a contribution to her or his community (Suryani 2013). Maksud penjelasan tersebut apabila seseorang tidak dapat menyadari potensinya dan berbuat produktif dalam lingkungannya serta tidak dapat mengontrol tekanan emosi pada dirinya, berarti seseorang tersebut bisa dipastikan mengalami gangguan jiwa.

Salah satu definisi gangguan jiwa dikemukakan oleh Frederick H. Kanfer dan Arnold P. Goldstein. Menurut kedua ahli tersebut Gangguan jiwa adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang karena dalam aktifitas ataupun interaksi dengan orang lain, dalam persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Kesulitan tersebut dikarenakan adanya perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang tidak masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, dan menyebabkan kendala terhadap individu atau orang lain (Ancok and Suroso 1995). Ada beberapa indikator yang mempengaruhi seseorang apabila mengalami gangguan jiwa, biasanya seseorang akan mengalami gangguan dalam pemikiran (Cognitive), kemauan (Volution), Emosi (Affective), dan tindakan atau perilaku (Psycomotor) (Maramis 2005).

Gangguan jiwa juga merupakan suatu gangguan yang menyebabkan disfungsi pada kondisi seseorang sehingga menyebabkan kehilangan keberfungsian sebuah peranan diri dalam lingkungan. Gangguan jiwa bisa juga dikatakan sebagai wujud dari bentuk dari perubahan emosi sehingga menyebabkan penyimpangan perilaku yang mengakibatkan ketidakwajaran dalam berperilaku (Nasir dan Muhith 2011).

Istilah rehabilitasi bukanlah hal yang asing dalam pendengaran telinga masyarakat dunia, rehabilitasi banyak diterapkan kepada seseorang yang mengalami sebuah permasalahan ataupun gangguan. Pandangan umum mengenai

rehabilitasi merupakan sebuah pemulihan kembali.

Rehabilitasi menggabungkan kata "re," yang berarti kembali, dan "habilitasi," yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, secara umum, rehabilitasi adalah proses membantu sesuatu untuk kembali ke kondisi semula, atau setidaknya memiliki pengganti yang setara. Ketika diterapkan pada manusia, terutama dalam konteks rehabilitasi sosial, ini merujuk pada bantuan yang diberikan kepada individu dengan gangguan fisik atau mental untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat atau untuk memulihkan kesehatan jiwa mereka agar dapat berfungsi seperti sebelumnya. Namun, jika didefinisikan secara lebih spesifik, rehabilitasi sosial mencakup aspek yang lebih luas dan komprehensif.

Program rehabilitasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, biasanya melibatkan berbagai upaya dari Dinas Sosial dan instansi terkait untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Berikut adalah beberapa poin umum yang dapat ditemukan dalam program seperti ini:

- a) Pendataan dan Identifikasi, Dinas Sosial melakukan survei untuk mendata jumlah ODGJ di wilayah tersebut dan juga melakukan identifikasi kebutuhan spesifik setiap individu, seperti perawatan medis, terapi, atau dukungan sosial.
- b) Rehabilitasi Sosial, Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan ODGJ agar dapat berfungsi secara sosial. Kegiatan meliputi pelatihan keterampilan, terapi psikososial, dan konseling.
- c) Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan, Dinas Sosial bekerja sama dengan rumah sakit jiwa atau puskesmas untuk memberikan perawatan medis dan terapi bagi ODGJ serta menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan mental.
- d) Pemberdayaan Ekonomi, Pelatihan keterampilan kerja untuk membantu ODGJ mendapatkan kemandirian ekonomi. Dukungan dalam bentuk modal usaha kecil atau akses ke program kewirausahaan.
- e) Pencegahan Pasung, Program ini bertujuan untuk menghapus praktik pemasangan terhadap ODGJ dengan memberikan alternatif perawatan yang lebih manusiawi dan memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya perawatan yang tepat.
- f) Dukungan Keluarga dan Masyarakat, dalam hal ini dinas sosial memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara mendukung anggota keluarga yang ODGJ dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian bersifat kualitatif, yang berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial secara deskriptif. Metode ini mengandalkan data deskriptif yang dapat berasal dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh individu yang diamati. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyingkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan dari data yang dirangkum dalam bentuk kalimat yang didapat melalui teknik pengumpulan informasi yang relevan dari kondisi alam.

Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan informasi dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis data yang tepat.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Salah satu faktor dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn adalah adanya tujuan dan kriteria yang ditetapkan dengan baik. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh tujuan dan keadaan yang melatarbelakangi pembuatannya. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan menggunakan tujuan kebijakan yang sedang berjalan; suatu kebijakan dianggap berjalan efektif apabila tujuan dan pelaksanaannya selaras. (Anggara, kebijakan publik, 2014). Tujuan program rehabilitasi bagi individu dengan gangguan jiwa adalah menjamin 80% ODGJ telah mencapai tahap pemulihan. Alur koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, dan keluarga dalam identifikasi, evaluasi, dan rujukan ODGJ yang telah mencapai tahap pemulihan 80% dan siap untuk rehabilitasi sosial diatur dalam pedoman operasional yang sangat tepat dan komprehensif.

##### **Sumber Daya**

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang paling penting secara efektif sangat penting bagi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya utama untuk memastikan keberhasilan proses implementasi adalah manusia. Salah satu orang yang melaksanakan kebijakan adalah sumber daya manusia. Dinas sosial memang memiliki sumber daya manusia sarjana psikologi, sosial, dan hukum, namun kekurangan tenaga medis. Padahal, tenaga medis sangat dibutuhkan saat turun lapangan untuk penanganan yang komprehensif. Di Kabupaten Ende, dinas sosial hanya memiliki satu sarjana psikologi, padahal kebutuhan akan tenaga kesehatan dan pekerja sosial (peksos) jauh lebih banyak, terutama mengingat jumlah ODGJ yang ada. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah ODGJ dan SDM yang tersedia. Dalam hal anggaran Dinas sosial hanya mampu menyediakan dana untuk satu orang ODGJ saja yang ingin direhabilitasi. Ini mengindikasikan bahwa anggaran yang ada jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh ODGJ yang membutuhkan rehabilitasi. Program pemberian makan juga untuk ODGJ yang berkeliaran, yang sempat dijalankan, tapi tidak dapat dilakukan secara rutin dan hanya sesekali kadang seminggu sekali karena dana yang terbatas dan tidak besar. Ini menunjukkan ketidakmampuan program untuk berjalan secara konsisten akibat minimnya dukungan finansial.

##### **Komunikasi Antar Badan Pelaksana**

Program implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan hubungan yang positif antara lembaga-lembaga yang terkait, yaitu melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Dinas Sosial secara aktif menjalin komunikasi dengan perawat medis dan kesehatan melalui korespondensi, sering kali melalui telepon atau WhatsApp, tetapi yang lebih penting adalah melalui korespondensi untuk menjamin bahwa informasi sampai dengan segera dan tindakan segera diambil untuk menangani ODGJ. Komunikasi antara lembaga-lembaga pelaksana berjalan dengan baik. Kehadiran perawat dengan terapi yang tepat membuktikan bahwa komunikasi ini membuahkan hasil yang konkret dalam penanganan ODGJ. Selain

menjalin komunikasi dengan pihak kesehatan pihak dinas sosial juga menjalin komunikasi dengan yayasan atau panti rehabilitasi terkait pengurusan surat izin operasional, proposal, dan rekomendasi program ODGJ. Hal ini menunjukkan bahwa dinas sosial, sebagai badan pelaksana, juga berperan sebagai penghubung bagi pihak yayasan dalam memenuhi persyaratan administratif dan mendapatkan dukungan resmi untuk program mereka. Meskipun dengan keterbatasan biaya, dinas sosial mampu membiayai penanganan awal ODGJ tersebut, yang menunjukkan efektivitas komunikasi dalam mobilisasi bantuan. Komunikasi antar badan pelaksana dalam penanganan ODGJ sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal respons cepat dan koordinasi operasional.

#### **Karakteristik Badan Pelaksana**

Sebagai pelaksana kebijakan, Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa semua pelaksana harus lebih ketat dan disiplin dalam proses implementasinya, dan bahwa implementasi harus mematuhi standar dan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Tentu saja, pelaksana yang demokratis dituntut untuk melakukan ini, artinya agen pelaksana harus menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dan bersikap persuasif, yang mengharuskan pelaksana yang dapat membujuk orang lain untuk bergabung.

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Ende, khususnya bidang rehabilitasi sosial, menunjukkan karakteristik badan pelaksana yang relatif terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas antara sekretariat yaitu berperan dalam menyiapkan program dan kegiatan untuk rehabilitasi. Setelah program disiapkan oleh sekretariat, bidang rehabilitasi sosial yang bergerak untuk menyiapkan anggaran dalam rencana kerja anggaran (RKA) dan selanjutnya turun lapangan untuk menemui ODGJ dan melakukan pendampingan. Pendampingan kepada keluarga inti ODGJ, termasuk keluarga dan tetangga terdekat, menunjukkan bahwa staf di Bidang rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada ODGJ secara individu, tetapi juga memahami pentingnya dukungan sosial dari lingkungan terdekat. Pembagian peran ini menunjukkan alur kerja yang terstruktur dari tahap perencanaan hingga eksekusi.

#### **Sikap atau Disposisi Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn, faktor terakhir yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan adalah kepribadian atau sikap pelaksana. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, disposisi sikap atau karakter pelaksana sangatlah penting. Sebab, hal ini turut mempengaruhi sejauh mana suatu kebijakan diimplementasikan secara efektif. Dedikasi yang tinggi, kejujuran, ketelitian, demokrasi, dan sebagainya merupakan beberapa contoh pola pikir tersebut. Oleh karena itu, mereka yang berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berpihak kepada masyarakat, harus dipilih dan diangkat sebagai profesional pelaksana kebijakan (Anggara, kebijakan publik, 2014).

Dalam menangani ODGJ, sikap pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat dikatakan kooperatif dan profesional. Pihak dinas sosial menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa penanganan ODGJ ini tidak bisa disamaratakan dan memerlukan pendekatan dengan kemampuan yang disesuaikan. Di tengah perbedaan pendapat internal, pihak dinas sosial tetap berpegang teguh pada standar operasional prosedur untuk menjaga standar pelayanan. Selain itu, dinas sosial

menunjukkan sikap yang mendukung kepada pihak yayasan panti rehab, yang sangat penting untuk penanganan ODGJ yang efektif. Meskipun ada tantangan terkait sumber daya seperti yang dibahas pada indikator sumber daya sebelumnya, sikap positif dari pihak dinas sosial ini menjadi modal penting untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang relevan dan efektif bagi ODGJ di wilayah kabupaten Ende.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Karena lingkungan merupakan faktor yang melatarbelakangi suatu kebijakan, maka faktor politik, sosial, dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebutuhan lingkungan merupakan alasan keberadaan suatu kebijakan. Kondisi sosial dan ekonomi lingkungan sangat penting bagi keberhasilan program penanganan ODGJ selama pelaksanaannya. Dalam lingkungan sosial dukungan dari keluarga sangat penting untuk keberhasilan program ODGJ. Keluarga diharapkan dapat menyemangati, mendampingi, dan mengingatkan ODGJ untuk selalu minum obat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial terdekat yaitu keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan dan pemeliharaan kesehatan mental ODGJ. Tanpa dukungan ini, upaya rehabilitasi di luar rumah mungkin tidak efektif. Sementara itu stigma masyarakat terhadap ODGJ harus dihilangkan. Stigma ini dianggap sangat berpengaruh pada ODGJ dan dapat menghambat proses rehabilitasi. Jika ODGJ yang sudah membaik tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena stigma, hal itu dapat memicu stres dan kambuhnya penyakit. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang tidak mendukung dan penuh prasangka negatif dapat merusak kemajuan yang sudah dicapai, bahkan menyebabkan kembali ke keadaan sebelumnya. Dalam lingkungan ekonomi, kemiskinan menjadi pemicu gangguan jiwa hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menjadi penyebab awal stres berat yang berujung pada gangguan jiwa. Efektivitas program sangat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor lingkungan ini dapat dikelola. Mengatasi stigma memerlukan perubahan norma sosial, sementara kemiskinan membutuhkan intervensi ekonomi yang lebih luas. Tanpa dukungan dari lingkungan yang mendukung dan penyelesaian masalah ekonomi dasar, program rehabilitasi akan menghadapi tantangan yang berkelanjutan.

### **E. KESIMPULAN**

Program rehabilitasi ODGJ merupakan suatu upaya yang penting dan strategis dalam membantu mereka yang mengalami permasalahan terkait dengan kesehatan jiwa. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, program rehabilitasi ODGJ ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap individu yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam kondisi ini, mereka seringkali mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang serius, serta menyebabkan disfungsi sosial dan ekonomi mereka tidak berfungsi layaknya manusia pada umumnya. Melalui program rehabilitasi, ODGJ diberikan kesempatan untuk mendapatkan perawatan dan perhatian yang mereka butuhkan guna memperbaiki kondisi kesehatan mereka, memulihkan kehidupan sosial mereka, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mewujudkan

kehidupan yang lebih baik. Kedua, program rehabilitasi ODGJ juga bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh ODGJ terhadap individu dan masyarakat yang ada disekitarnya yang tentunya hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat merugikan.

Program rehabilitasi ODGJ juga dapat memberikan pendekatan yang holistik dalam membantu individu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan buruk mereka, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan dalam proses pemulihan. Terakhir, program rehabilitasi ODGJ juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk pencegahan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Program rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ende belum berjalan maksimal. Dinas Sosial fokus pada program rehabilitasi, namun kurang aspek medis, sosial dan Rehabilitasi medis yang seharusnya bersifat individual, mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah dan tujuan kebijakan, serta sumber daya, sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Dinas Sosial memiliki sumber daya manusia yang terbatas, pekerja sosial yang kurang, serta anggaran yang terbatas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Harsono, H. (2006). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta
- Ananda, K. R. (2021). "Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah Pemasangan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*
- Eliska, M. R. (2020). "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*